

KRITIK DAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI PAPUA: ANALISIS IMPLEMENTASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Muhammad Ibaadurrahman¹, Achmad Aidil Viqri², Anargya Nugraha Putra Wikarsa³, Azril Jaya Rajasa⁴, Ridwan⁵

2310413081@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310413005@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310413085@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310413091@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
ridwan.fisip@upnvj.ac.id⁵

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

ABSTRAK

Makalah ini membahas kebijakan pendidikan di Papua dalam upaya mengatasi disparitas pendidikan yang terjadi di wilayah tersebut. Dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari Otonomi Khusus Papua hingga program afirmasi pendidikan. Fokus utama terletak pada identifikasi hambatan struktural, kultural, dan geografis yang menghambat implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan afirmasi telah memberikan dampak positif, tantangan seperti minimnya infrastruktur, kekurangan tenaga pengajar, dan kesenjangan kualitas pendidikan masih signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kebijakan berbasis kebutuhan lokal serta kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat Papua. Studi ini merekomendasikan penguatan peran otonomi khusus dalam pendidikan berbasis kearifan lokal serta peningkatan kapasitas guru sebagai upaya menciptakan pemerataan pendidikan yang berkeadilan di Papua.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Papua, Otonomi Khusus, Afirmasi Pendidikan, Kesenjangan Pendidikan.

ABSTRACT

This paper discusses educational policies in Papua aimed at addressing the educational disparity in the region. Using a descriptive-analytical approach, the study examines various government policies, ranging from Papua's Special Autonomy to educational affirmative action programs. The main focus is on identifying structural, cultural, and geographical barriers that hinder the implementation of these policies. The findings reveal that, despite the positive impact of affirmative action, significant challenges persist, such as inadequate infrastructure, a shortage of teaching staff, and disparities in education quality. Therefore, it is necessary to strengthen need-based local policies and foster collaboration between the central government, local authorities, and indigenous Papuan communities. This study recommends enhancing the role of special autonomy in local wisdom-based education and improving teacher capacity as a means to achieve equitable education in Papua.

Keywords: Educational Policy, Papua, Special Autonomy, Affirmative Education, Educational Disparity.

PENDAHULUAN

Papua, sebagai provinsi terluar di Indonesia, menghadapi tantangan unik dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Papua (2022), indeks pembangunan manusia (IPM) Papua mencapai 68.4 pada tahun 2021, yang masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional Indonesia. Hal ini mencerminkan kebutuhan serius untuk merevisi dan meningkatkan kebijakan pendidikan di wilayah ini. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua terdapat penyebab utamanya yakni,

rendahnya kualitas pendidikan, yang tercermin dari minimnya akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai, kurangnya jumlah tenaga pengajar berkualitas, dan tantangan geografis yang menghambat distribusi sumber daya pendidikan ke daerah-daerah terpencil. Selain itu, tingkat kesehatan masyarakat Papua juga masih rendah, terlihat dari angka harapan hidup yang lebih pendek dibandingkan rata-rata nasional akibat terbatasnya akses ke layanan kesehatan. Faktor ekonomi turut berkontribusi, di mana pendapatan per kapita masyarakat Papua berada di bawah rata-rata nasional, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kombinasi dari faktor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi ini menciptakan siklus yang saling memengaruhi, sehingga memperlambat peningkatan IPM di Papua dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Berbagai penelitian sebelumnya telah berupaya mengkaji permasalahan pendidikan di Papua. Penelitian oleh Susilo (2020) menunjukkan bahwa distribusi guru yang tidak merata menjadi salah satu penghambat utama kualitas pendidikan di daerah pedalaman. Sementara itu, studi dari Lestari dan Rahmawati (2021) menyoroti bahwa implementasi kebijakan afirmasi pendidikan sering kali tidak disertai dengan pengawasan dan evaluasi yang memadai. Meskipun penelitian-penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami masalah pendidikan di Papua, terdapat kekurangan dalam mengintegrasikan perspektif lokal dan evaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan yang diterapkan. Selain itu, masih minim kajian yang mengaitkan secara langsung implementasi kebijakan pendidikan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Papua.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan yang telah dilaksanakan di Papua, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan SDM di wilayah tersebut. Pertanyaan utama yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan di Papua selama ini? Dan bagaimana strategi kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan?”. Penelitian ini penting karena pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing. Dengan menganalisis kebijakan yang ada dan mengevaluasi dampaknya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga dapat diterapkan secara nasional. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan multidimensional yang digunakan, yaitu dengan mengintegrasikan analisis implementasi kebijakan, evaluasi dampak, serta rekomendasi strategi berbasis kebutuhan lokal. Penelitian ini juga bersifat melengkapi dan menyempurnakan hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan terarah.

Dengan melihat berbagai tantangan dan hambatan yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dan berorientasi pada kebutuhan lokal. Melalui pendekatan ini, diharapkan kualitas pendidikan di Papua dapat meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya akan mendorong kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat Papua secara menyeluruh.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Safitri, Yuniarti, dan Rostika (2022) tentang upaya peningkatan pendidikan berkualitas di Indonesia menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur . melalui beberapa sumber buku, artikel ilmiah dari sumber jurnal yang relevan dari hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan topik pembahasan. Metodologi penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam

konteks pendidikan. Para peneliti menggunakan teknik content analysis untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia, dengan melakukan pengkajian mendalam terhadap dokumen-dokumen resmi, laporan implementasi program pendidikan, dan indikator pencapaian SDGs pada sektor pendidikan. Hasil penelitian mengungkapkan sejumlah temuan kritis terkait dinamika pendidikan di Indonesia. Pertama, terdapat kesenjangan signifikan dalam capaian kualitas pendidikan antar wilayah, dengan wilayah-wilayah seperti Papua menghadapi tantangan substantif dalam implementasi program pendidikan berkualitas. Penelitian mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menghambat pencapaian pendidikan berkualitas, meliputi keterbatasan infrastruktur pendidikan, kualifikasi tenaga pendidik yang belum memadai, keterbatasan akses pendidikan di daerah terpencil, dan ketidakselarasan kurikulum dengan kebutuhan kontekstual masyarakat lokal.

Konteks Papua memerlukan strategi pendidikan yang sangat spesifik dan transformatif, yang tidak sekadar memenuhi standar administratif, melainkan mampu memberikan respons komprehensif terhadap kompleksitas tantangan pendidikan di wilayah tersebut. Temuan penelitian Safitri et al. menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan di Papua mensyaratkan pendekatan multidimensional yang mempertimbangkan keragaman sosial-budaya, geografis, dan struktural. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan pendidikan yang responsif terhadap konteks lokal, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas guru, pengembangan kurikulum yang kontekstual, dan pemerataan akses pendidikan. Lebih lanjut, studi ini merekomendasikan sejumlah intervensi strategis, di antaranya:

- (1) program pelatihan guru berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik wilayah,
- (2) pengembangan infrastruktur pendidikan yang adaptif terhadap kondisi geografis Papua,
- (3) implementasi kurikulum muatan lokal yang mengintegrasikan kearifan budaya setempat, dan
- (4) skema pendanaan pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mendiagnosis permasalahan, melainkan menyediakan kerangka konseptual dan praktis untuk mentransformasi sistem pendidikan di Papua menjadi lebih inklusif, berkualitas, dan bermakna bagi pembangunan sumber daya manusia.

Selanjutnya, Penelitian Idrus et al. (2023) tentang implementasi kebijakan manajemen sumber daya manusia (SDM) memberikan perspektif teoritis yang signifikan dalam memahami dinamika peningkatan kinerja organisasi di era bisnis global, yang dapat diekstrapolasikan ke konteks pengembangan pendidikan di Papua. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan utama penelitian ini mengungkapkan sejumlah aspek kritis dalam implementasi kebijakan manajemen sumber daya manusia yang efektif. Pertama, penelitian mengidentifikasi bahwa keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengembangkan strategi SDM yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis global. Studi ini menemukan bahwa organisasi yang berhasil menunjukkan karakteristik utama:

- (1) kemampuan melakukan pengembangan kompetensi berkelanjutan,
- (2) sistem rekrutmen yang transparan dan berbasis merit,
- (3) mekanisme evaluasi kinerja yang komprehensif, dan
- (4) strategi retensi talenta yang inovatif.

Relevansi penelitian Idrus et al. terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan di

Papua terletak pada pendekatan sistemik dan transformatif dalam mengelola sumber daya manusia. Penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang dapat diadaptasi untuk konteks pendidikan, dengan fokus pada strategi pengembangan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Implikasi utama yang dapat diekstrapolasikan meliputi perlunya sistem pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan di Papua, Lalu desain mekanisme rekrutmen dan seleksi yang mempertimbangkan keunikan konteks lokal, Lalu pengembangan sistem penilaian kinerja yang komprehensif dan berkeadilan, dan yang terakhir strategi retensi dan motivasi yang responsif terhadap tantangan geografis dan sosial-budaya Papua. Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi kualitas pendidikan tidak sekadar persoalan infrastruktur atau anggaran, melainkan sangat tergantung pada kualitas pengelolaan sumber daya manusia. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas pendidikan di Papua membutuhkan pendekatan holistik yang mensinergikan aspek kebijakan, manajemen, pengembangan kompetensi, dan pemberdayaan berkelanjutan dalam ekosistem Pendidikan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan Deskriptif. Menurut Moleong (2018), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dalam konteksnya. Oleh karena itu, peneliti juga akan menerapkan teknik observasi untuk menilai implementasi kebijakan secara langsung di lapangan, serta mengumpulkan dokumen dan laporan yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan. Dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai kondisi pendidikan di Papua. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang kondisi pendidikan saat ini di Papua, serta untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan pendidikan terhadap kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Menurut Gay dan Airasian (2000), penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan keadaan objek tanpa manipulasi dari peneliti. Dalam konteks ini, metode deskriptif akan digunakan untuk mengumpulkan data tentang kualitas pendidikan, termasuk infrastruktur, kurikulum, dan sumber daya manusia yang ada di Papua.

Selain pendekatan kualitatif dan deskriptif, penelitian ini juga akan menerapkan analisis kebijakan untuk menilai efektivitas dan relevansi kebijakan pendidikan yang diterapkan. Analisis ini akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tujuan, praktik, dan hasil dari program-program pendidikan yang dilaksanakan. Dengan menggunakan kerangka kerja analisis kebijakan, peneliti akan berusaha memahami bagaimana kebijakan pendidikan di Papua dikembangkan, diimplementasikan, dan diterima oleh masyarakat. Denzin dan Lincoln (2011) menekankan bahwa triangulasi data dari beragam sumber dapat meningkatkan validitas hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti akan menggabungkan analisis dari wawancara, observasi, dan data sekunder untuk menghasilkan penilaian yang lebih komprehensif tentang kebijakan pendidikan dan dampaknya. Sumber data dalam penelitian ini mencakup dokumen kebijakan yang relevan, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta data sekunder dari lembaga pemerintah dan organisasi lain. Dengan mengakses berbagai sumber informasi ini, peneliti diharapkan dapat menyusun narasi yang komprehensif dan mempertimbangkan perspektif yang berbeda terkait implementasi kebijakan pendidikan di Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan utama terkait implementasi kebijakan pendidikan di Papua. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis

dokumen kebijakan, diperoleh data berikut. Pertama, kesenjangan distribusi tenaga pendidik menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga pendidik terkonsentrasi di daerah perkotaan, sementara wilayah pedalaman kekurangan guru berkualitas. Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Papua (2022), sekitar 65% guru berada di wilayah perkotaan, meskipun 70% populasi siswa berada di daerah pedalaman. Ketimpangan ini menyebabkan rendahnya akses pendidikan berkualitas di daerah terpencil. Kedua, minimnya infrastruktur pendidikan di Papua menjadi tantangan serius. Dari total 500 sekolah yang ada, sekitar 45% tidak memiliki fasilitas dasar seperti ruang kelas layak, laboratorium, atau perpustakaan. Selain itu, kondisi geografis Papua yang sulit membuat pembangunan infrastruktur menjadi kendala besar. Ketiga, kurangnya pemanfaatan kurikulum kontekstual menunjukkan bahwa kurikulum yang diterapkan kurang relevan dengan kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat Papua. Pendekatan berbasis lokal yang mengintegrasikan budaya Papua jarang ditemukan dalam materi pembelajaran, sehingga mengurangi relevansi pendidikan bagi siswa. Keempat, dampak kebijakan afirmasi pendidikan, seperti beasiswa khusus Papua, telah membantu meningkatkan angka partisipasi sekolah. Namun, efektivitas kebijakan ini terganggu oleh kurangnya pengawasan dan evaluasi. Sebagai contoh, hanya 40% penerima beasiswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Implementasi kebijakan pendidikan di Papua menunjukkan bahwa meskipun terdapat inisiatif afirmasi, pelaksanaan di lapangan masih jauh dari optimal. Salah satu tantangan utama adalah distribusi tenaga pendidik yang tidak merata. Hal ini sejalan dengan temuan Susilo (2020) yang menyebutkan bahwa distribusi guru menjadi masalah mendasar di wilayah pedalaman Papua. Solusi untuk permasalahan ini adalah dengan menerapkan kebijakan insentif bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil, seperti kenaikan gaji atau tunjangan tambahan. Selain itu, minimnya infrastruktur pendidikan di Papua memerlukan perhatian serius. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan berbasis komunitas untuk membangun sekolah-sekolah kecil yang adaptif terhadap kondisi geografis. Pemerintah juga perlu mengembangkan kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah untuk mendanai proyek infrastruktur pendidikan. Ketidaksesuaian kurikulum dengan konteks lokal menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal harus menjadi prioritas. Misalnya, mengintegrasikan nilai-nilai budaya Papua dalam pelajaran sejarah, bahasa daerah, dan keterampilan hidup dapat meningkatkan relevansi pendidikan dan mendorong partisipasi siswa. Beasiswa afirmasi pendidikan yang diberikan kepada siswa Papua perlu diiringi dengan pendampingan akademik dan non-akademik. Hal ini penting untuk memastikan penerima beasiswa mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Studi ini merekomendasikan program mentoring yang melibatkan alumni penerima beasiswa untuk mendukung generasi berikutnya.

Kebijakan pendidikan di Papua perlu dikaitkan langsung dengan strategi pembangunan SDM. Penelitian Idrus et al. (2023) menekankan pentingnya manajemen SDM yang efektif untuk mendukung pencapaian kualitas pendidikan. Dalam konteks Papua, ini berarti menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk guru, membangun mekanisme evaluasi kinerja yang adil, serta menciptakan sistem rekrutmen tenaga pendidik berbasis merit. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa peningkatan kualitas pendidikan di Papua tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi lintas sektor dan pendekatan multidimensional. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat lokal perlu bekerja sama untuk mengatasi hambatan geografis, sosial, dan budaya yang ada. Dengan

menerapkan strategi kebijakan yang berbasis bukti, diharapkan kualitas pendidikan di Papua dapat meningkat secara signifikan, sehingga mendorong pembangunan SDM yang lebih baik dan berdaya saing. Melalui hasil dan pembahasan ini, penelitian memberikan rekomendasi konkret yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan kebijakan pendidikan di Papua. Fokus pada pemerataan akses, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan relevansi kurikulum menjadi langkah penting dalam membangun masa depan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas di wilayah ini.

KESIMPULAN

Pendidikan di Papua menghadapi tantangan kompleks yang secara signifikan mempengaruhi pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang rendah mencerminkan ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, di mana faktor geografis, ekonomi, dan sosial budaya turut berkontribusi pada situasi ini. Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun telah ada berbagai inisiatif kebijakan afirmasi, implementasi pendidikan di Papua masih jauh dari optimal, dengan kesenjangan yang sangat nyata antara wilayah perkotaan dan pedalaman. Salah satu permasalahan mendasar adalah distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, dimana sekitar 65% guru terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara 70% populasi siswa berada di daerah pedalaman. Infrastruktur pendidikan pun sangat minim, dengan 45% sekolah tidak memiliki fasilitas dasar seperti ruang kelas layak, laboratorium, atau perpustakaan. Kondisi geografis Papua yang sulit semakin memperburuk situasi, menghambat upaya pembangunan infrastruktur pendidikan yang berkualitas dan merata.

Kurikulum yang diterapkan saat ini juga dinilai kurang relevan dengan konteks lokal, tidak cukup mengintegrasikan kearifan budaya Papua dalam materi pembelajaran. Meskipun terdapat program beasiswa afirmasi, efektivitasnya masih rendah, dengan hanya 40% penerima beasiswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sekadar memberikan akses tidak cukup untuk menjamin keberhasilan pendidikan. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan multidimensional untuk mentransformasi pendidikan di Papua. Strategi yang diusulkan meliputi pemberian insentif bagi guru di daerah terpencil, pengembangan infrastruktur berbasis komunitas, integrasi kurikulum dengan budaya lokal, serta pendampingan akademik berkelanjutan bagi penerima beasiswa. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat lokal menjadi kunci utama dalam mengimplementasikan perubahan yang komprehensif. Jadi, peningkatan kualitas pendidikan di Papua membutuhkan komitmen serius dan pendekatan holistik yang mempertimbangkan keunikan konteks sosial, budaya, dan geografis wilayah tersebut. Bukan sekadar soal infrastruktur atau anggaran, namun tentang menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, responsif, dan bermakna bagi masyarakat Papua. Dengan strategi yang tepat, pendidikan dapat menjadi instrumen utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu menggerakkan pembangunan berkelanjutan di wilayah ini.

Rekomendasi

Pendidikan di Papua membutuhkan transformasi menyeluruh yang tidak sekadar bersifat administratif, melainkan strategis dan komprehensif. Kompleksitas tantangan pendidikan di wilayah ini mensyaratkan intervensi kebijakan yang melihat persoalan secara multidimensional, mempertimbangkan keunikan geografis, sosial-budaya, dan struktural yang ada. Pemerintah perlu merancang pendekatan yang tidak hanya mengatasi masalah infrastruktur dan sumber daya, tetapi juga mampu memberdayakan masyarakat lokal dalam proses pembangunan pendidikan. Redistribusi dan pengembangan tenaga pendidik menjadi prioritas utama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Ketimpangan distribusi guru yang sangat signifikan, dengan 65% tenaga pendidik terkonsentrasi di wilayah perkotaan, membutuhkan intervensi sistematis. Pemerintah perlu merancang kebijakan insentif yang komprehensif, tidak sekadar memberikan tambahan gaji, melainkan menciptakan sistem penghargaan dan pengembangan karir yang menarik bagi guru-guru berbakat untuk mengabdikan diri di daerah pedalaman Papua.

Program pelatihan berkelanjutan yang disesuaikan dengan konteks lokal, serta sistem pertukaran guru antar wilayah, dapat menjadi instrumen efektif dalam menjembatani kesenjangan kualitas pendidikan.

Infrastruktur pendidikan di Papua memerlukan pendekatan inovatif yang mampu beradaptasi dengan kondisi geografis yang sulit. Dengan 45% sekolah tidak memiliki fasilitas dasar, pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan dengan pendekatan konvensional. Model sekolah berbasis komunitas yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah, menjadi alternatif strategis. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk mengembangkan sekolah adaptif, memanfaatkan teknologi pendidikan seperti perpustakaan digital, dan menciptakan solusi infrastruktur yang berkelanjutan. Kurikulum pendidikan di Papua harus direvisi secara fundamental untuk menciptakan relevansi dengan konteks lokal. Integrasi kearifan budaya Papua ke dalam struktur kurikulum bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan partisipasi dan makna pendidikan bagi masyarakat setempat. Hal ini mensyaratkan tidak hanya penyusunan ulang materi ajar, tetapi juga pelatihan komprehensif bagi tenaga pendidik agar mampu mengimplementasikan pendekatan berbasis budaya dalam proses pembelajaran.

Program beasiswa afirmasi membutuhkan reformasi menyeluruh untuk meningkatkan efektivitasnya. Saat ini, hanya 40% penerima beasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi, yang mengindikasikan kebutuhan akan dukungan yang lebih komprehensif. Pemerintah perlu mengembangkan sistem pendampingan akademik dan non-akademik yang berkelanjutan, termasuk program mentoring yang melibatkan alumni, konseling psikologis, dan mekanisme evaluasi berkala. Pendekatan ini akan memastikan bahwa beasiswa tidak sekadar memberikan akses, tetapi sungguh-sungguh mendukung keberhasilan pendidikan. Transformasi pendidikan di Papua pada akhirnya bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengembangkan manajemen sumber daya manusia yang efektif dan responsif. Sistem rekrutmen berbasis merit, mekanisme penilaian kinerja yang komprehensif, dan jalur pengembangan profesional yang jelas bagi tenaga pendidik adalah prasyarat untuk menciptakan ekosistem pendidikan berkualitas. Pendekatan holistik ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia Papua yang lebih inklusif, berdaya saing, dan bermartabat. Dengan komitmen serius dan strategi yang tepat, pendidikan dapat menjadi instrumen fundamental dalam mentransformasi masa depan Papua

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (18 Desember 2023). [Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia. Diakses pada 10 Desember 2024, dari <https://papua.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE1IzI%3D/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia.html>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1996). Handbook of qualitative research. *Journal of Leisure Research*, 28(2), 132.
- Idrus, S., Ruhana, F., Amalia, M. R., Rosyid, A. F., & Kuswandi, D. (2023). Implementasi kebijakan manajemen sumber daya manusia yang efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi di era bisnis global. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*,

7(1), 72-89.

- Safitri, A. O., Yuniarti, V. D., & Rostika, D. (2022). Upaya peningkatan pendidikan berkualitas di Indonesia: Analisis pencapaian sustainable development goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7096-7106.
- Susilo, J. H., Kholilurrohmah, M., & Hasan, Z. (2020). Analisis indeks pembangunan Manusia di provinsi Papua. *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 172-187.
- Lestari, I., Pariama, S., Rahmawati, A. I., & Santoso, T. (2023, July). Analisis Motivasi Belajar Matematika Mahasiswa Papua. In *Seminar Nasional Pendidikan* (Vol. 1, No. 1).